



## Lima Persen Aset Pemrov Kalbar Masih dikuasai Mantan Pejabat

**GANDENG KPK SELESAIKAN ASSET BERMASALAH**



**PONTIANAK-RK.** Biro Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Kalbar mulai berbenah. Semua aset akan dinventarisir. Termasuk mengambil alih aset yang masih dikuasai oleh sejumlah mantan pejabat.

**Baca Hal... 4**

## Lima Persen Aset Pemrov Kalbar Masih Dikuasai Mantan Pejabat

Kepala Biro Pengelolaan Aset Pemrov Kalbar, Linda Purnama, mengungkapkan aset Pemrov Kalbar yang masih dikuasai sejumlah mantan pejabat berkisar lima persen. Dari total jumlah aset yang ada.

Untuk penertiban aset yang bermasalah itu, ia pun mengisyaratkan melakukan upaya represif. Bila surat peringatan tak diindahkan.

"Jadi, ketika sudah diberikan surat teguran sebanyak tiga kali, kalau tidak ada respon maka, kita tertibkan secara represif," ucapnya belum lama ini.

Selain itu, lanjut dia, penertiban aset yang bermasalah, juga akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Termasuk lembaga antirasuah, KPK.

"Untuk pengamanan aset, kita sudah di dampingi KPK. Kita nampaknya sudah diarahkan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum," tegasnya.

Menurutnya, beberapa aset yang dikuasai mantan pejabat sudah ada yang diambil alih. Baru-baru ini, satu aset Pemrov Kalbar di Singkawang berhasil dikuasai.

"Aset itu dikuasai mantan pejabat. Tapi sekarang sudah kita tarik. Penyelesaian hukumnya sekarang masih berproses di pengadilan," tutur Linda, enggan merinci jenis aset tersebut.

Ia menjelaskan, tahun ini, semua aset milik Pemrov Kalbar akan diinventarisir. Termasuk yang dipinjam pakai oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dijelaskannya, aset yang dipinjam pakai Pemkab atau Pemkot, masa

berlakunya hanya lima tahun saja. Kalaupun boleh diperpanjang, hanya satu kali untuk lima tahun berikutnya.

"Setelah itu kan harus ada solusi. Harus ada kebijakan. Sehingga aset yang dipinjam pakai itu, bisa tidak bermasalah kedepannya," imbuhnya.

Di luar itu, ia memastikan, tahun ini, urusan aset milik Pemprov Kalbar, semuanya harus rampung. Termasuk menginventarisir mobil-mobil dinas. Kini, pihaknya sudah mulai melakukan sensus aset.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar pun wajib melakukan sensus aset itu. Tujuannya untuk pencatatan, penatausahaan dan pengamanan.

"Sehingga aset kita itu dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Sesuai aturan yang ada. Itu yang menjadi target kami," papar Linda.

Selain itu, untuk memudahkan inventarisir aset, kedepan Biro Pengelolaan Aset pemrov Kalbar akan menerapkan sistem pengelolaan berbasis digital. Sebagaimana yang diinginkan Gubernur Sutarmidji.

"Kedepan, aset itu berapa jumlahnya, dimana tempatnya, harus bisa di click oleh seluruh masyarakat. Saat ini, kita terus sosialisasikan ke OPD soal penggunaan sistem quick respond ini," katanya.

Imbuh Linda, "Ketika kita ingin mengetahui perolehan barang itu, tahun berapa dan sebagainya itu cukup dengan smart phone, kita sudah bisa ketahui secara rinci. Kita akan push untuk itu".

**Laporan: Abdul Halikurrahman  
Editor: Mohamad iQbaL**